



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VIII DPR RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 24
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / Ke- 5
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Rabu, 24 Oktober 2018
Waktu	: Pukul 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Membahas Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 sesuai hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI
Hadir	: 1. .... orang dari 49 orang Anggota 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya 3. Menteri Sosial RI beserta jajarannya 4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta jajarannya 5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 09.49 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda **“Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI”**. disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penyesuaian RKA KL Tahun 2019 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, sebagai berikut:
  - a. Alokasi pagu anggaran Kementerian Agama RI sebesar Rp62.066.722.163.000-, (*enam puluh dua triliun enam puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
  - b. Alokasi pagu anggaran Kementerian Sosial RI sebesar Rp58.906.458.379.000-, (*lima puluh delapan triliun sembilan ratus enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
  - c. Alokasi pagu anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp493.636.794.000-, (*empat ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
  - d. Alokasi pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp619.425.671.000-, (*enam ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

2. Komisi VIII DPR RI mendukung pengalokasian dana siap pakai (DSP) penanggulangan bencana dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.500.000.000-, (*enam triliun lima ratus miliar rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI mendesak kepada kementerian/lembaga mitra Komisi VIII DPR RI agar dalam pelaksanaan RKA/KL tahun 2019 memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
  - a. Mengingat alokasi pagu anggaran kementerian/lembaga hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI tidak ada perubahan, maka dalam rangka melakukan penanganan terhadap kondisi yang mendesak dan kejadian luar biasa seperti bencana, kementerian/lembaga dapat melakukan realokasi pagu anggaran antar program setelah mendapat persetujuan dari Komisi VIII DPR RI.
  - b. Pelaksanaan program tahun anggaran 2019 hendaknya mengakomodir aspirasi yang disampaikan melalui Komisi VIII DPR RI.
  - c. Mengupayakan pengalokasian anggaran selisih tunjangan kinerja guru dan dosen dan peningkatan honor penyuluh agama non PNS pada Kementerian Agama RI.
  - d. Penentuan penerima manfaat program bantuan sosial Kementerian Sosial RI wajib berdasarkan basis data terpadu (BDT).
  - e. Pelaksanaan program penanggulangan bencana BNPB:
    - harus fokus pada mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD melalui peningkatan kualitas SDM serta penyediaan sarana-prasarana.
    - Melakukan kajian asuransi bencana (*risk financing*).

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.12 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**ttd**

**Dr. H.M. ALI TAHER, S.H. M.Hum.**